



RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jl. Swarna Bumi Gedung Eks Multiyears Lt. 1 Tembilahan
Telp. (0768) 22105 ; (0768) 21093

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dapat terselesaikan.

Penyusunan Renja PD Tahun 2025 disusun agar pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD, lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Renja ini merupakan acuan dalam mengusulkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur secara berkesinambungan.

Semoga Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan berbagai informasi yang diperlukan dan kami menyadari bahwa Penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna baik dalam penyajian maupun substansi materi yang ada. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bersama-sama membantu dan mendukung dalam penyusunan dokumen ini.

Tembilahan, Juli 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Ir. H. ILLYANTO, MT

NIP. 19650101 199303 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	39
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	43
BAB IV PENUTUP	63

DAFTAR GAMBAR/TABEL

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir	2
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir.....	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir ..	20
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir	23
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Tahun 2025.....	40
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

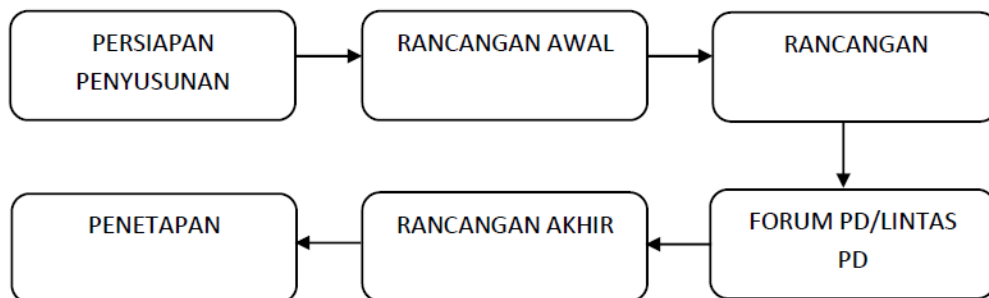
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan.
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024, dan RKPD 2025)
2. Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana dan pengampu kepentingan.
 - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan.

- Sinkronisasi dan Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025.
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Me Kabupaten Indragiri Hilir
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : DPRD, OPD terkait, Perguruan Tinggi , dan Pemangku Kepentingan yang terkait lainnya.
 5. Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan Dokumen
 6. Penetapan

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir



Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir adalah penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir 2024 – 2026 serta mengacu pada Rencana Kerja. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang

direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengingat beberapa hal sebagai berikut: Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.
- 2) Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Rebpulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.
17. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagai acuan dan tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 yang sesuai tugas, pokok, dan fungsi.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025;
2. Mengelola upaya – upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target – target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Renja tahun 2023 dan Renstra hingga tahun 2024-2026;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 1.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Sedangkan realisasi hasil pelaksanaan program kegiatan Tahun 2023 dapat diuraikan berdasarkan hasil / keluaran beserta targetnya dengan rincian laporan kinerja Perangkat Daerah dengan pokok-pokok materi antara lain :

- 1) Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang **tidak memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan indikator Persentase koperasi aktif dan target indikator tersebut adalah 33% dan telah terealisasi sebesar 25,4%.
- 2) Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang **tidak memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Persentase koperasi aktif dan target indikator tersebut adalah 53,65 % dan telah terealisasi sebesar 11,7%.
- 3) Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang **tidak memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator Jumlah KSP/USP koperasi Sehat dan target indikator tersebut adalah 65 Koperasi dan telah terealisasi sebesar 60 Koperasi.
- 4) Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang **tidak memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator Cakupan

Koperasi yang memiliki Kompetensi berdaya saing tersebut adalah 78,53 % dan telah terealisasi sebesar 7,81 %.

- 5) Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang **tidak memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator target 72 % dan realisasi 4,1%.
- 6) Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang **tidak memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pengembangan UMKM dengan indikator target 1.407 Unit Usaha dan realisasi 319 Unit Usaha.
- 7) Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi 80.80% dengan realisasi 99,79%;
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 8 Dokumen dan terealisasi 8 Dokumen
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% dan telah terealisasi 100%
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan terealisasi 100 %
- 8) Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator target Jumlah Koperasi yang Di-monitoring dan Dievaluasi 30 Koperasi dan terealisasi 30 Koperasi;
- 9) Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator target Jumlah

Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Dilaksanakan 1 kali Koperasi dan terealisasi 1 Kali;

- 10) Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan Indikator target Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil 15 Kelompok UMKM dan terealisasi 25 Kelompok UMKM.
- 11) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator target Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang Direkomendasikan 20 Lembar dan terealisasi 30 Lembar ;
- 12) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator target Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi Kriteria Penilaian 50 Koperasi dan terealisasi 60 Koperasi;
- 13) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan Indikator target Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil 15 kelompok UMKM dan terealisasi 25 Kelompok UMKM.
- 14) Faktor-faktor pendorong, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
 - o Program Terpenuhinya Target : Penerapan kebijakan untuk memantapkan dan lebih mendorong optimalisasi sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.

- Program Melebihi Target : - Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan intensif - Ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- 15) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Kerja Perangkat Daerah; Memperhatikan pencapaian target Program yang sebagian besar telah terpenuhi bahkan melebihi target, maka diharapkan pengambilan kebijakan dan penyediaan anggaran dapat mendorong pelaksanaan kegiatan dengan melakukan berbagai inovasi, sehingga kedepan perkembangan ekonomi serta kegiatan perkoperasian, usaha mikro dan perdagangan menjadi lebih baik serta mampu tampil dan bersaing tidak hanya di tingkat lokal tetapi nasional bahkan internasional.
- 16) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Dari hasil perencanaan dan penganggaran yang perlu dilaksanakan adalah mempunyai suatu perencanaan baik jangka menengah maupun jangka panjang untuk menjawab kegiatan yang berkembang dalam era digitalisasi saat ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program, kegiatan dan Sub kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Kegiatan/sub kegiatan) s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target program ,Kegiatan, Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	81,5	0	80,8	99,79	1,24	78,81	178,6	2,19
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	73	0	8	8	1,00	72	80,0	1,1
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	0	5	5	1,00	5	10,0	2,00
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	0	3	3	1,00	3	6,0	2,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	99	100	100	1,00	100	299	2,99
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	27	30	22	0,73	55	104,0	1,82
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	100	100	100	100	1,00	100	300	3

2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	0	0	0	#DIV/0!	2	2,0	1,00
2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	3	4	3	0,75	4	10,0	2,50
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100	0	0	0	#DIV/0!	100	100	1,00
2.17.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	0	0	0	#DIV/0!	1	1,0	0,50
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35	0	0	0	#DIV/0!	1	1,0	0,03
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	0	1	0	0	1	1,0	0,20
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100	99	100	98,54	0,99	100	297,54	2,98
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	0	0	0	#DIV/0!	5	5,0	2,50
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	43	12	9	0,75	7	59,0	3,93
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	1,00	2	6,0	3,00
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	2	8	8	1,00	8	18,0	1,80
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	1,00	12	36,0	3,00
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378	245	328	328	1,00	348	921,0	2,44
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	#DIV/0!	5	5,0	#DIV/0!
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	96,53	0,97	100	296,53	2,97
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	100	100	100	1,00	50	250,0	5,00

2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	1,00	3	9,0	3,00
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	21	21	21	1,00	4	46,0	11,50
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang penunjang urusan pemerintah daerah	100	96	100	100	1,00	100	296	2,96
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	22	28	23	0,82	22	67,0	3,05
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37	24	37	11	0,30	37	72,0	1,95
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	8	17	10		1	19,0	19,00
							0,59			
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki izin	45	0	33	25,4	0,77	43	68,4	1,52
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang Direkomendasikan	20	0	20	30	1,50	20	50,0	2,5
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	35	0	20	30	1,50	35	65,0	1,86
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1,0	#DIV/0!

2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang aktif	75	67	53	11,7	0,22	71	149,7	2,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Di-monitoring dan Dievaluasi	30	30	30	30	1,00	30	90,0	3,0
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50	0	30	30	1,00	50	80,0	1,60
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30	30	15	15	1,00	30	75,0	2,50
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha 15	49	12	65	60	0,92	15	87,0	1,78
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi Kriteria Penilaian	50	31	50	60	1,20	50	141	2,82
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30	37	60	60	1,00	30	127,0	4,23
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	3	10	3	3	1,00	3	16,0	5,33
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan Koperasi yang Memiliki Kompetensi Berdaya Saing	78	71	78	7,81	0,10	75	153,8	1,97
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi	1	30	1	1	1,00	1	32,0	32,0
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60	30	1	1	1,00	60	91,0	1,52
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Mandiri	19	0	0	0	#DIV/0!	5	5,0	0,26
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Diberdayakan	5	0	0	0	#DIV/0!	5	5,0	1,00

2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	25	0	0	0	#DIV/0!	25	25,0	1,00
2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	30	0	0	0	#DIV/0!	30	30,0	1,00
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	30	0	0	0	#DIV/0!	30	30,0	1,00
2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	30	0	0	0	#DIV/0!	30	30,0	1,00
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	20	0	0	0	#DIV/0!	20	20,0	1,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	75	78	72	4,1	0,06	72	154,1	2,05
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Terdaftar dalam Online Data System (ODS)	5000	90	72	4,38	0,06	5000	5094,38	1,02
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30	30	15	30	2,00	30	90,0	3,00
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60	60	100	40	0,40	60	160,0	2,67
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40	14	10	20	2,00	40	74,0	1,85
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	31	0	0	0	#DIV/0!	31	31,0	1,00
2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30	0	0	0	#DIV/0!	30	30,0	1,00
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	5000	7321	5000	285	0,06	5000	12606,0	2,52

2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Unit Usaha Yang Di Fasilitas Dalam Pengembangan Usaha	68	2	1407	319	0,23	65	386,0	5,68
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	15	1	15	25	1,67	15	41,00	2,73
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	46	3	25	25	1,00	46	74,0	1,61

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam evaluasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dinas dituntut untuk selalu berkembang dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Pengolahan data dalam jumlah banyak, serta adanya perubahan yang bersifat rutin dan berulang-ulang, sering menimbulkan kesulitan dalam penyediaan informasi.

Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”, oleh karenanya koperasi juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan jenis indikator yang dikaji sesuai dengan tolak ukur dan indikator pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragir Hilir serta sesuai dengan tugas fungsi, bersama ini disampaikan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun* 2024	Tahun** 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)		(8)		
1	Persentase UMKM dan Koperasi yang Naik Skala Usaha	Persen		65,00		63,00	65,00	67,00	61,78		62,00	63,00	
2	Persentase Koperasi yang aktif	Persen		70,00	68,00		70,00	72,00	67,70	68,92	70,00	71,00	
3	Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah baru	Persen		77,00	69,00		77,00	80,00	90,36	85,77	86,00	88,00	
4	Nilai Evaluasi RB Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit					32	32	33	29,79	29,79	29,79	29,79	
5	Nilai AKIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil						73	76	71,35	70,95	71,35	71,35	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dimana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat dan tentunya berdasarkan prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Harapannya dengan adanya pelayan publik berupa pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selain minimnya alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan, juga Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka aparatur yang ada harus mencukupi/ideal dalam jumlah dan memiliki persyaratan kuantitas. Oleh karena itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan kompetensi sumber daya aparatur dan penambahan aparatur.

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, bila permasalahan itu tidak diselesaikan maka pemenuhan target kinerja yang berasal dari visi dan misi kepala daerah akan menjadi terganggu dan cenderung tidak terpenuhi. Sehingga diperlukan penelaahan yang lebih mendalam.
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Saat ini Perangkat Daerah terus diminta untuk berinovasi terhadap peningkatan pelayanan kepada publik, melalui program-program kegiatan kemasyarakatan dan program-program prioritas teknis yang akan memberikan dampak makro yang positif kepada masyarakat. Peluang untuk mewujudkan pelayanan publik dan diharapkan dapat berkelanjutan.
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan. Secara umum, rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2025 adalah peningkatan kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Manusia OPD, peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana terdapat pergeseran dan penambahan anggaran Pokir DPR pada anggaran kegiatan rancangan awal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Indragiri Hilir

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan						
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					6.586.857.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					6.756.809.817	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.586.857.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.756.809.817	
	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6.586.857.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6.756.809.817	
1	02.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Indragiri Hilir	-		-	5.463.273.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Indragiri Hilir	-		-	5.448.827.725	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	192.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	189.692.445	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4 Dokumen	118.000.000			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4 Dokumen	115.538.055	
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
				Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	3 Laporan	74.500.000			Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	3 Laporan	74.154.390	
			Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah										

2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	3.975.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	3.974.905.962	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Orang/Bulan	30	3.975.000.000			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Orang/Bulan	30	3.974.905.962	
					Orang/bulan						Orang/bulan		
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	38.100.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	36.355.600	
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Dokumen	2 Dokumen	4.500.000			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Dokumen	2 Dokumen	2.626.000	
2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Dokumen	4 Dokumen	33.600.000			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Dokumen	4 Dokumen	33.729.600	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	20.330.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	28.660.000	
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Paket	30 Paket	10.500.000			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Paket	30 Paket	9.000.000	
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Orang	1 Orang	9.830.000			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Orang	2 Orang	19.660.000	

2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	668.664.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	812.224.518
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Paket	5 Paket	2.500.000			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Paket	5 Paket	2.288.850
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Paket	7 Paket	85.000.000			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Paket	7 Paket	98.557.550
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Paket	2 Paket	76.000.000			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Paket	2 Paket	76.180.000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Paket	6 Paket	22.500.000			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Paket	6 Paket	22.258.118
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Dokumen	12 Dokumen	40.400.000			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Dokumen	12 Dokumen	39.200.000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Laporan	348 Laporan	442.264.200			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Laporan	12 Laporan	573.740.000

2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	75.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-	-
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	Unit	2 Unit	75.000.000			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	Unit	-	-	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	436.908.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	350.059.200	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Laporan	12 Laporan	3.500.000			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Laporan	12 Laporan	3.000.000	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Laporan	4 Laporan	112.848.000			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Laporan	4 Laporan	60.228.000	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Laporan	5 Laporan	320.560.800			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Laporan	5 Laporan	286.831.200	

	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	56.770.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	56.930.000	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
				<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Unit	28 Unit	36.270.000			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Unit	22 Unit	36.270.000	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
				<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Unit	37 Unit				<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Unit	37 Unit	9.290.000	
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
				<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi</i>	Unit	1 Unit				<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi</i>	Unit	1 Unit	11.370.000	
2	02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	78.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	78.000.000	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	78.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	78.000.000	

2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
				<i>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Unit Usaha	35 Unit	78.000.000			<i>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Unit Usaha	35 Unit	78.000.000	
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-		
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
				<i>Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Unit Usaha	1 Unit Usaha				<i>Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Unit Usaha	1 Unit Usaha	16.760.000	

3	02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Indragiri Hilir	-	-	141.350.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Indragiri Hilir	-	-	125.000.000		
2.17.03.2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	141.350.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	125.000.000		
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi												
				<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>	Unit Usaha	15 Unit	89.000.000			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>	Unit Usaha	15 Unit	90.000.000
						Usaha						Usaha	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota												
				<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	Unit Usaha	30 Unit	52.350.000			<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	Unit Usaha	30 Unit	35.000.000
						Usaha						Usaha	
4	02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Indragiri Hilir	-	-	108.230.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Indragiri Hilir	-	-	75.000.000		

2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	108.230.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	75.000.000	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota												
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>		30 Unit Usaha	53.450.000			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>		30 Unit Usaha	35.000.000	
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan												
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>		3 Unit Usaha	54.780.000			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>		3 Unit Usaha	40.000.000	
5	02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Indragiri Hilir	-	78%	-	73.450.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Indragiri Hilir	-	78%	-	75.000.000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	73.450.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	75.000.000	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi												
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	Orang	60 Orang	73.450.000			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	Orang	60 Orang	75.000.000	

6	02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Indragiri Hilir	-	Koperasi	19 Koperasi	195.890.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Indragiri Hilir	-	Koperasi	19 Koperasi	125.000.000
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	195.890.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	125.000.000
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
				<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya</i>	Unit Usaha	25 Unit Usaha	71.540.000			<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya</i>	Unit Usaha	25 Unit Usaha	75.000.000
	2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
				<i>Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha				<i>Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha	
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
				<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha	72.000.000			<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha	50.000.000
	2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
				<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha				<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha	
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota											
				<i>Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Unit Usaha	20 Unit	52.350.000			<i>Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Unit Usaha	20 Unit	0

						Usaha							Usaha	
7	02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Indragiri Hilir	-	-	376.654.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Indragiri Hilir	-	-	634.100.704		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Indragiri Hilir	-	-	376.654.000		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Indragiri Hilir	-	-	634.100.704		
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro												
				<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>	Unit Usaha	30 Unit	30.000.000			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>	Unit Usaha	30 Unit	33.800.830	
						Usaha						Usaha		
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro												
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	Unit Usaha	30 Unit	65.450.000			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	Unit Usaha	30 Unit	121.263.374	
						Usaha						Usaha		
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro												
				<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	Unit Usaha	40 Unit	85.750.000			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	Unit Usaha	40 Unit	430.000.000	
						Usaha						Usaha		
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro												

				<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	Orang	10 Orang	76.450.000			<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	Orang	10 Orang	0	
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil												
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	Unit Usaha	60 Unit Usaha	40.650.000			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	Unit Usaha	60 Unit Usaha	0	
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro												
				<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	Unit Usaha	5000 Unit Usaha	78.354.000			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	Unit Usaha	5000 Unit Usaha	49.036.500	
8	02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Indragiri Hilir	-		-	150.010.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Indragiri Hilir	-		-	195.881.388	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	150.010.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	195.881.388	
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro												
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	Unit Usaha	15 Unit Usaha	84.560.000			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	Unit Usaha	15 Unit Usaha	86.557.500	
J U M L A H							6.586.857.000						6.756.809.817	

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Dari Tabel 2.3. di atas bahwa pagu Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai rancangan awal RKPD sebesar Rp.6.586.857.000,- setelah di lakukan analisis kebutuhan maka jumlah anggaran rancangan Renja menjadi Rp.6.756.809.817,- termasuk di dalamnya kegiatan usulan masyarakat/musrenbang dan usulan pikir/reses.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan hasil pemetaan serta mapping program/kegiatan tahun 2025 terdiri dari 8 program yang dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, meliputi 7 kegiatan, 19 sub kegiatan.
2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM, meliputi 1 kegiatan, 1 sub kegiatan.
3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI, meliputi 1 kegiatan, 2 sub kegiatan.
4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI, meliputi 1 kegiatan, 2 sub kegiatan.
5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN, meliputi 1 kegiatan, 1 sub kegiatan.
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, meliputi 1 kegiatan, 2 sub kegiatan.
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), meliputi 1 kegiatan, 4 sub kegiatan.
8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM, meliputi 1 kegiatan, 2 sub kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang mengusulkan melalui Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai dengan tingkat Kabupaten, atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir. Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2025, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian renstra SKPD maupun terhadap RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Indragiri Hilir

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.17.0 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab.Inhil	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	4	
	2.17.0 7.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab.Inhil	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	4	

	2.17.07.2.0 1.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab.Inhil	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	4	
	1	Bantuan Peralatan Usaha Peras Santan dan Perlengkapannya Untuk Kelompok UMKM Dua Sahabat Sukses Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	2	Bantuan Peralatan Usaha Perbengkelan Untuk Kelompok UMKM AI Motor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang	Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	3	Bantuan Peralatan Usaha Tenda dan Perlengkapannya Untuk Kelompok UMKM Lintas Bersatu Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan	Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	4	Bantuan Peralatan Studio Videografi Untuk Kelompok UMKM Majesty Studio Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu	Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk pemulihan pasca Covid-19, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen RKP Tahun 2025, telah ditetapkan sasaran dan Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;

Proyek pembangunan harus sesuai dengan tema pembangunan, holistik dengan melibatkan sinergi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, integratif dengan memperhitungkan keterkaitan antar proyek dengan berbagai sumber pendanaan, serta berbasis spasial dengan lokasi yang jelas. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi optimal untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas nasional di masing-masing provinsi.

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan Tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2025 di samping mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 dan Visi pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2025-2026, juga mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2025, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2025 sesuai dengan tema yaitu “Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah”.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-1 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2026, serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 **“Penguatan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Dan Berkelanjutan”** untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM;
2. Peningkatan Tata Kelola;
3. Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
4. Penguatan Ekonomi.

Adapun prioritas RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 yaitu;

1. Akselerasi Kualitas dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan;
2. Akselerasi Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
3. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
5. Pengembangan potensi agroindustri daerah;

6. Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian;
7. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah;
8. Memperkuat manajemen ASN;
9. Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja;
10. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik.

Dalam hal pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada penyusunan RKPD Provinsi Riau tahun 2025, pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Program Prioritas yang mendukung secara langsung terhadap hal sebagaimana dimaksud.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing “

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Usaha Koperasi; .
2. Meningkatnya Pelaku dan Daya Saing Usaha Mikro
3. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target 2025
Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis unggulan daerah	Persentase UMKM dan Koperasi yang naik skala usaha	Persen	65,00
Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang aktif	Persen	72,00
	Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah baru	Persen	80,00
Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil	Nilai Evaluasi RB Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit	Nilai	33
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil	Nilai AKIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil	Prediket	BB (76)

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan faktor berikut :

1. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's);
2. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;
3. Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UKM.

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program/kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Tahun 2025. Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, berbanding lurus dengan tersedianya anggaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang diakomodir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir di Tahun 2025 adalah 8 (Delapan) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 6.756.809.817,-.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Satu Program Rutin yang bersifat Kesekretariatan yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, dengan sasaran program untuk Melakukan Fasilitasi pengajuan izin usaha simpan pinjam Koperasi.
3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, dengan sasaran program untuk Melakukan Pengawasan atas kelembagaan dan kegiatan usaha Koperasi.
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan sasaran program untuk Melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, dengan sasaran program untuk Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui pelatihan.
6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, dengan sasaran program untuk Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan pada

aspek kelembagaan Koperasi serta meningkatkan kualitas produk dan usaha koperasi, perluasan akses pembiayaan bagi koperasi, serta perluasan akses pemasaran produk koperasi.

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), dengan sasaran program untuk Meningkatkan pemberdayaan UKM pada aspek kelembagaan, produksi, perluasan akses pembiayaan, dan perluasan akses pasar produk UKM.
8. Program Pengembangan UMKM, dengan sasaran program untuk Meningkatkan kualitas produk UKM serta peningkatan kualitas pemasaran produk UKM.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/ kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2025 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

1. UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan di bidang koperasi dan UKM;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 .
4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
5. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 merupakan program/

kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan perencanaan anggaran.

2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 8 Program, 14 Kegiatan dan 33 Sub kegiatan yang diusulkan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif belanja langsung dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebesar Rp. 6.756.809.817,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur pelaksana urusan daerah di bidang koperasi dan Usaha Mikro menjalankan urusan wajib bukan pelayanan dasar berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dituangkan pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH							6.756.809.817,00							6.659.730.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.756.809.817,00							6.659.730.000,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						6.756.809.817,00							6.659.730.000,00		
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</i>	79,81 Persen			79,81 Persen	5.448.827.725,00						79,81 Persen	5.500.950.000,00		
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	73 Nilai			4 Dokumen	189.692.445,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	73 Nilai	196.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen			4 Dokumen	115.538.055,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	5 Dokumen	120.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3 Laporan			3 Laporan	74.154.390,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	3 Laporan	76.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100.Persen			-	3.974.905.962,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	100.Persen	3.977.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	57 Orang/bulan			30 Orang/bulan	3.974.905.962,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	57 Orang/bulan	3.977.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	100.Persen			2 Dokumen	36.355.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	100.Persen	40.600.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	2.626.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	33.729.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	4 Dokumen	35.600.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase aparatur yang berkinerja baik</i>	100/Persen			100 Persen	28.660.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	100 Persen	22.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	35 Paket			1 Paket	9.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	35 Paket	12.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	5 Orang			2 Orang	19.660.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	5 Orang	10.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik</i>	100/Persen			100 persen	812.224.518,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	100 Persen	763.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			5 Paket	2.288.850,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	2 Paket	3.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	15 Paket			5 Paket	98.557.550,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	15 Paket	95.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			2 Paket	76.180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN	2 Paket	77.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			5 Paket	2.288.850,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	2 Paket	3.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	15 Paket			5 Paket	98.557.550,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	15 Paket	95.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			2 Paket	76.180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN	2 Paket	77.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	0 Laporan			100 persen	350.059.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Manajemen ASN	ASN	0 Laporan	441.350.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	0 Laporan			12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Manajemen ASN	ASN	0 Laporan	3.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	0 Laporan			4 Laporan	60.228.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Manajemen ASN	ASN	0 Laporan	112.850.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	0 Laporan			5 Laporan	286.831.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	0 Laporan	325.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terpeliharanya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0 Unit			100 persen	56.930.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	0 Unit	60.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	0 Unit			28 Unit	36.270.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	0 Unit	37.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	0 Unit			37 Unit	9.290.000,00	Kab Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	0 Unit	10.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi</i>	0 Unit			12 Unit	11.370.000,00	Kab Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	0 Unit	12.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-			-	78.000.000,00						-	85.000.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	78.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Koperasi	-	85.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	0 Unit			35 Unit Usaha	78.000.000,00	Kab Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Koperasi		85.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	0 Unit			37 Unit	9.290.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	0 Unit	10.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit			12 Unit	11.370.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Memperkuat manajemen ASN	ASN	0 Unit	12.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-			-	78.000.000,00						-	85.000.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	78.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Koperasi	-	85.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02.2.01.0001		Fasilitasi Pemonuan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				35 Unit Usaha	78.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Koperasi		85.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	0 Unit			37 Unit	9.290.000,00	Kab Inragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN	0 Unit	10.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit			12 Unit	11.370.000,00	Kab Inragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN	0 Unit	12.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-			-	78.000.000,00						-	85.000.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	78.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Koperasi	-	85.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02.2.01.0001		Fasilitasi Pemanuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				35 Unit Usaha	78.000.000,00	Kab Inragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Koperasi		85.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>				30 Unit Usaha	35.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanufaktur Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Koperasi KSP/USP		54.260.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan															
			<i>Jumlah Koperasi yang Dibenarkan Penilaian Kesehatan</i>				3 Unit Usaha	40.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanufaktur Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Koperasi KSP/USP		55.780.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase Koperasi yang memiliki kompetensi berdaya saing</i>	76 Persen			76 Persen	75.000.000,00						76 Persen	74.560.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-			30 Orang	75.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas; Mendorong Kewirausahaan; Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanufaktur Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Koperasi	-	74.560.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				30 Orang	75.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas; Mendorong Kewirausahaan; Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanufaktur Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Koperasi		74.560.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Mandiri	6 Koperasi			6 Koperasi	125.000.000,00						6 Koperasi	200.590.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang terfasilitasi	-			30 Koperasi	125.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanipulasi Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Koperasi	-	200.590.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Komitran Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Komitran				30 Unit Usaha	75.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanipulasi Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Koperasi		72.540.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya</i>				30 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanajemen Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi	Koperasi		73.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																
			<i>Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota</i>				20 Unit Usaha	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanajemen Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan	Koperasi		54.550.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase usaha mikro dan kecil</i>	74 Persen			74 Persen	634.100.704,00						74 Persen	390.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-			20 Unit Usaha	634.100.704,00			-	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	UMKM	-	390.250.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				20 Unit Usaha	33.800.830,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	UMKM		35.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				90 Unit Usaha	121.263.374,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	UMKM		66.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				30 Unit Usaha	430.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	UMKM		86.850.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				31 Orang	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Optimalisasi dan Penguatan Kemiskinan	UMKM		77.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				- Unit Usaha	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan	UMKM		45.350.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.2.01.0014		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdala</i>				5000 Unit Usaha	49.038.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	UMKM		79.250.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Persentase jumlah unit usaha yang di fasilitasi dalam pengembangan usaha</i>	66 Persen			66 Persen	195.881.388,00						66 Persen	153.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	-			5 Usaha Mikro	195.881.388,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kowirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanipulasi Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	UMKM	-	153.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08.2.01.0002		Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				30 Unit Usaha	86.557.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromartim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	UMKM		85.460.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi															
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				60 Unit Usaha	109.323.688,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromartim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	UMKM		67.540.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
J U M L A H								6.756.809.817,00							6.659.730.000,00		

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Indragiri Hilir sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga

kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Komitmen tersebut selanjutnya diharapkan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf.
3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir, maka penetapan prioritas pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan upaya mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai wadah kolektif yang efisien dan efektif untuk pemberdayaan yang saling bersinergi dengan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif dan berdaya guna serta mempunyai nilai tambah secara ekonomis.